

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sepakat, APBD DKI 2020 Rp 89,5 Triliun

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah melalui proses yang cukup alot, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 disepakati sebesar Rp89,5 triliun.

Peliput: John

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memastikan publik bisa mengakses daftar belanja pemprov. "Kita pastikan masyarakat bisa mengakses APBD 2020. Tidak ada yang ditutupi," kata Anies usai penandatanganan kesepakatan plafon anggaran bersama DPRD, Kamis (28/11).

Menurut Anies, pihaknya akan publikasi-

kan KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2020 setelah pembahasan di DPRD selesai, dan penandatanganan MoU. "Sekarang data entry dimulai. Data entry itu sesudah MoU dilakukan. Kita ingin pastikan semua kegiatan strategis aman, karena itu menyangkut kepentingan umum yang besar sekali," ujar Anies.

Anies Buka Akses Warga untuk Mengawasi

PEMERINTAHAN TRANSPARAN

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta sangat mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal keterbukaan pada setiap

tahap penyusunan RAPBD Tahun 2020.

Penyusunan RAPBD 2020 pun telah melalui sejumlah prosedur yang berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan pihaknya bersama eksekutif segera membahas rincian anggarannya. Sehingga, sesuai jadwal, pada tanggal 11 Desember nanti APBD bisa diketok. "Yang

sudah disetujui ini plafonnya. Nanti langsung kita bahas rincian-nya," kata Prasetyo.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, sejumlah program pemprov yang diusulkan sebelumnya terpaksa dipangkas untuk mencegah defisit lebih besar.

Anggaran yang dipangkas terutama untuk penyerahan modal pemerintah di sejumlah BUMD. Misalnya untuk MRT, dari usulan Rp4,1 triliun dipotong Rp1 triliun, begitu juga PAM Jaya dari rencana Rp1,7 triliun disetujui hanya Rp513 miliar serta lainnya. (ruh)